

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Sesuai anjuran pemerintah pusat tentang kerja sama pemerintah dan swasta dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur daerah dan seiring dengan semakin pesatnya Inisiatif kerjasama swasta dan pemerintah ini telah di dukung dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015, Peraturan ini mengatur mengenai prinsip kerjasama, jenis infrastruktur dan bentuk kerjasama, penanggungjawab proyek kerjasama dan aspek lainnya. Namun, pendanaan proyek pemerintah daerah melalui skema kerja ini belum terealisasi secara maksimal. Perkembangan kebutuhan pembangunan segala bidang khususnya bidang infrastruktur di Indonesia pada umumnya dan di daerah Kabupaten / Kota pada khususnya yang sangat membutuhkan sumber daya yang cukup besar dalam segala bidang baik pembangunan fisik infrastruktur maupun non fisik. Namun, dana yang tersedia sangat terbatas baik dari pemerintah pusat (APBN) maupun pemerintah daerah (APBD). Selain itu dalam penerapan PPP juga terhambat karena belum siapnya stakeholder terkait.

Para ahli manajemen keuangan proyek mengusulkan konsep pendanaan melalui kerja sama pemerintah dan swasta (*Private-Public Partnership*). Ashuri & Mostaan, (2015) mengatakan bahwa konsep pendanaan PPP ini telah di mulai sejak tahun 1989 di Amerika dan tahun 1992 di Inggris. Pelaksanaan PPP ini membawa dampak positif terhadap pembangunan infrastruktur di negara tersebut. Ahli lain,

juga menyimpulkan bahwa di negara-negara asia juga telah mulai di terapkan PPP ini sejak dua dekade yang lalu Chan, Yeung, Yu, Wang, & Ke, (2011). Di Indonesia juga telah di mulai pendanaan kerjasama pemerintah dan swasta, namun masih terbatas pada proyek-proyek pemerintah pusat.

Adapun permasalahan tidak Optimumnya dalam penerapan (*Private-Public Partnership* PPP) di Indonesia baik pusat maupun daerah menurut Tri Widodo (2004) dapat diperhatikan dari 3 (tiga) ukuran sebagai berikut :

1. Pertama di lihat pada alasan perpolitisan dalam mendapatkan pemerintah yang berdemokratis dan mempunyai dorongan dalam mewujudkan good governance and good society.
2. Yang ke dua adalah suatu strategi lain karena adanya keterbatasan sumber daya pemerintah, baik sumber daya anggaran, manusianya, assetnya, maupun kemampuan manajemen dalam pengelolaan assetnya.
3. Yang ketiga adalah alasannya Ekonomis : meminimalisir ketimpangan atau kesenjangan yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan produktivitas ekonomi, serta meningkatkan kualitas serta kontinuitas untuk dapat mengurangi dan meminimalisir resiko keterbatasan penganggaran keuangan daerah.

Dengan adanya masalah atau problema yang di alami pemerintah daerah yaitu tentang kondisi keterbatasan pendanaan atau pembiayaan infrastruktur di daerah maka perlu dari pemerintah untuk memperhatikan kemungkinan di terapkannya metoda pendanaan infrastruktur publik yang di danai oleh kerjasama pemerintah daerah dan swasta sehingga di harapkan misi pemerintah daerah tercapai yaitu memberikan layanan publik yang baik. Salah satu kajian kemungkinan penerapan

ini adalah kesiapan pemerintah daerah dalam melaksanakan kerjasama swasta dan pemerintah daerah. Untuk menyikapi problema tentang keterbatasan pendanaan dibidang infrastruktur pembangunan ekonomi seperti infrastruktur jalan, pariwisata, pembangkit listrik dan pertambangan.

Hal ini juga mungkin terjadi di kabupaten Solok untuk terselenggaranya program PPP tersebut. Walaupun jumlah APBD di tingkat daerah selalu mengalami kenaikan dari setiap tahun nya, alokasi belanjanya juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Misalnya, Kabupaten solok mempunyai anggaran tahun 2012 sampai tahun 2016 yang mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp. 690,223,049,691 tahun 2012, Rp. 893,623,268,916 tahun 2013, Rp. 923,426,726,868 tahun 2014, Rp. 1,103,946,633,087 tahun 2015, dan Rp. 1,354,766,412, tahun 2016.

Begitu juga dengan pemerintah daerah lainnya, seperti APBD kabupaten solok juga mengalami kenaikan, namun masih belum bisa menutupi kebutuhan infrastruktur yang di perlukan setiap tahun. Untuk itu pemerintah perlu menyikapi hal tersebut dengan mengkaji sumber dana selain dari pemerintah.

Berdasarkan penjelasan di atas maka di perlukan suatu penelitian kesiapan pemerintah daerah dalam melaksanakan *public-private partnership (PPP)* ini. Karena belum adanya penelitian empiris tentang kajian terhadap kesiapan pemerintah daerah dalam melaksanakan PPP di Kabupaten Solok yang dilihat dari faktor Eksternal seperti kesiapan pasar, Kesiapan pemerintah dan ketidakpastian lingkungan dan faktor Internal seperti Aspek Komitmen pemerintah, Koordinasi Kelembagaan, dan Kompetensi SDM. Dengan demikian judul tesis ini adalah Faktor Kesiapan Implementasi Public Private Partnerships (PPP) Dalam Penyiapan

Infrastruktur Konstruksi Daerah Studi Kasus : Penyediaan Infrastruktur Daerah Kabupaten Solok.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasar kepada latar belakang dari penelitian ini dilihat bahwa adanya masalah atau problema yang di alami pemerintah daerah khususnya Kabupaten Solok yaitu tentang kondisi keterbatasan pendanaan atau pembiayaan infrastruktur di daerah, maka pemerintah perlu memperhatikan kemungkinan diterapkannya metoda pendanaan infrastruktur publik yang di danai oleh kerjasama pemerintah daerah dan swasta atau *Public – Private Partnerships (PPP)*, sehingga di harapkan misi pemerintah daerah dapat tercapai suatu hal untuk memberikan nilai pelayanan yang baik kepada masyarakat Kabupaten Solok.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Kondisi Eksternal

1. Apakah Kesiapan pasar berpengaruh terhadap penerapan PPP ?
2. Apakah kesiapan pemerintah berpengaruh terhadap penerapan PPP ?
3. Apakah ketidakpastian lingkungan berpengaruh terhadap penerpan PPP ?

Kondisi Internal

1. Apakah kesiapan dari Aspek Komitmen Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap penerapan PPP ?
2. Apakah kesiapan Aspek Koordinasi Kelembagaan berpengaruh terhadap penerapan PPP ?
3. Apakah Aspek Kompetensi SDM berpengaruh terhadap penerpan PPP ?

1.4 Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti nyata untuk hal-hal pokok yang menyangkut kesiapan penerapan PPP di Kabupaten Solok dari segi Eksternal dan Internal.

1. Eksternal terdiri dari :

- a. Meneliti pengaruh kesiapan pasar terhadap penerapan PPP.
- b. Meneliti pengaruh Kesiapan Pemerintah terhadap penerapan PPP.
- c. Meneliti pengaruh Ketidakpastian Lingkungan terhadap penerapan PPP.

2. Internal terdiri dari :

- a. Meneliti pengaruh Aspek Komitmen Pemerintah Daerah terhadap penerapan PPP
- b. Meneliti pengaruh Aspek Koordinasi Kelembagaan terhadap penerapan PPP
- c. Meneliti pengaruh Aspek Kompetensi SDM terhadap penerapan PPP

1.5 Manfaat penelitian

1. Manfaat secara teori

Penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada teoritis dan sistematis yang ada dengan dasar dari ilmu pengetahuan yang sudah ada agar terlaksananya suatu rencana yang matang dalam pelaksanaan dan penerapan *Public – Private Partnerships* (PPP) pada daerah yang mempunyai target terhadap pemenuhan kebutuhan tentang infrastruktur di daerah Kabupaten Solok.

2. Manfaat secara praktik

Secara praktis agar memberikan suatu masukan dan pemahaman terhadap Pemerintah daerah dan pihak swasta sebagai andil pelaksana dan pihak yang mempunyai andil terhadap penerapan *Public – Private Partnerships* (PPP) pada daerah Kabupaten Solok dan disesuaikan dengan kebutuhan sosial masyarakat bidang Infrastruktur Daerah dalam ruang lingkup dan bahasan yang di butuhkan.

1.6 Batasan Masalah Penelitian

Agar dapat memberikan arah dan batasan masalah yang jelas dalam upaya mencapai tujuan maka penelitian ini dibatasi oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Penelitian ini dilakukan di Daerah Kabupaten Solok.
2. Responden dalam penelitian ini adalah terdiri dari unsur Pemerintah, Legislatif, Bidang usaha seperti Kontraktor dan Masyarakat atau perwakilannya yaitu Wali nagari.

1.7 Sistematika Penulisan

Kerangka atau susunan penelitian ini terdiri dari :

A. BAB I. Pendahuluan

Pada bagian ini menjelaskan tentang latar belakang dari suatu masalah, perumusan masalah, manfaat penelitian, tujuan dan ruang atau lingkup penelitian hingga sistematika penulisan.

B. BAB II. Tinjauan Pustaka

Pada bagian ini akan menerangkan hal-hal yang menjadi dasar teoritis dalam pelaksanaan penelitian ini. Sumber-sumber pustaka yang digunakan dalam penelitian ini meliputi baik dari buku, jurnal atau sumber lainnya khususnya yang berkaitan dengan konsultan supervisi.

C. BAB III. Metodologi Penelitian

Pada bagian ini menjelaskan tentang pembentukan hirarki struktural, pembentukan keputusan perbandingan dan alur pikir penelitian serta langkah dan perhitungan.

D. BAB IV. Pembahasan dan Hasil

Pada bagian ini akan menyajikan proses pengumpulan data hingga penyajiannya baik berupa tabulasi ataupun grafis yang dilengkapi dengan proses pembahasan sesuai tujuan penelitian.

E. BAB V. Penutup dan Kesimpulan

Pada bagian ini menerangkan hasil dan kesimpulan dari studi yang telah diteliti.